

IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI DI UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2018-2019

Oleh : Fauziana Ulfi

E-mail : fauzianaullfi17@gmail.com

Dosen Pembimbing : Wazni, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The quality of college is in line with the quality of its library. Riau University continues to strive for improve the quality of its library. Riau University Libraries has received Accreditation A in 2013 and is getting it again accreditation A in December 2019. In addition, Riau University Library as well received ISO 9001: 2008 in 2018 and updated to ISO 9001: 2015 in 2019. However, with accreditation A said, Riau University Library still does not comply with the Head's Regulation National Library No. 13 of 2017 concerning National Standards for College Libraries.

This study aims to describe (1) implementation of the National Standards for College Libraries at the University Riau in 2018-2019 and (2) factors affecting the implementation of the National Standard for College Libraries at Riau University in 2018-2019. The research method used is qualitative descriptive research type. Research location at Riau University Library. Sources of data in this study are informants, mass media and documents. The data collection technique through documentation and interviews.

The results of this study indicate that the implementation of the National Standard for College Libraries at Riau University in 2018-2019 is not optimal yet. There are several indicators that have not been fulfilled in these standards, such as the number of book and magazine collections that are still lacking, additional collections in a year less than 3% of the total collection existing, building area not up to standards, unqualified library staff standard, and the total budget which is only 0,8% of the total budget of Riau University. Based on Edward III's theory of Policy Implementation, communication, disposition and organizational structure has been achieved. However the resource factor has not yet been achieved. This causes the lack of student's interest to visit UNRI library. The number of visitors to the UNRI Library is not comparable with the number of students at the University of Riau. Average number of visitors Riau University Libraries in 2018 as many as 5,200 people and in 2019 as many as 4,169 people. Meanwhile, the number of students at Riau University that year about 35,000 people.

Keyword: *Implementation, National Standards for Libraries*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Setiap penyelenggara perpustakaan wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan sesuai dengan Pasal 9 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi (SNP PT) termuat dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2017 yang meliputi:

1. Standar koleksi perpustakaan;
2. Standar sarana prasarana perpustakaan;
3. Standar pelayanan perpustakaan;
4. Standar tenaga perpustakaan;
5. Standar penyelenggaraan perpustakaan;
6. Standar pengelolaan perpustakaan.

Perpustakaan Universitas Riau (UNRI) telah menjadikan Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagai acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangannya. Hal ini dapat dilihat dari akreditasi A yang diperoleh Perpustakaan UNRI pada tahun 2013 berdasarkan evaluasi Lembaga Akreditasi Perpustakaan dan kembali memperoleh akreditasi A pada Desember 2019. Perpustakaan UNRI juga meraih sertifikasi ISO 9001:2008 pada tahun 2018 dan telah diperbaharui

menjadi ISO 9001:2013 pada tahun 2019.

Walaupun Perpustakaan UNRI telah Akreditasi A, namun implementasi Perka Perpustnas No. 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pustakawan yang dimiliki Perpustakaan UNRI yaitu sebanyak 23 orang. Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi, rasio pustakawan yaitu setiap 500 (lima ratus) mahasiswa paling sedikit 1 (satu) pustakawan. Jadi jika terdapat 35.000 mahasiswa maka pustakawan yang ada seharusnya sebanyak 70 pustakawan. Jumlah pustakawan yang ada di Perpustakaan Universitas Riau masih jauh dari cukup, padahal pustakawan merupakan seorang yang sangat berperan penting dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan itu sendiri agar dapat berkembang lebih baik. Jam buka perpustakaan juga belum memenuhi standar. Dalam Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi jam kerja perpustakaan per minggu paling sedikit 54 jam, namun jam buka Perpustakaan Universitas Riau hanya 49 jam.

Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi juga mengharuskan Perpustakaan Perguruan Tinggi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Perpustakaan Universitas Riau sendiri sudah menggunakan digital *library*, namun sistem tersebut sering eror. *Database* sistem yang sering mengalami kerusakan (*crash*) menyebabkan layanan dilakukan secara manual yang mengakibatkan antrean panjang dalam proses peminjaman buku. Jumlah komputer yang ada di Perpustakaan Universitas Riau juga masih terbatas, sehingga pemustaka

harus antri untuk menggunakan layanan OPAC untuk mencari buku yang dibutuhkan.

Minat civitas akademik Universitas Riau untuk memanfaatkan fasilitas dan pelayanan yang ada di Perpustakaan UNRI juga masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pengunjung
Perpustakaan UNRI Tahun 2018-
2019

No	Bulan	Tahun	
		2018	2019
1	Januari	3.756	11.832
2	Februari	8.549	6.567
3	Maret	8.772	3.566
4	April	7.019	2.780
5	Mei	4.390	16.008
6	Juni	705	3.063
7	Juli	1.046	3.482
8	Agustus	922	304
9	September	8.143	569
10	Oktober	10.071	685
11	November	5.155	849
12	Desember	3.876	325
Jumlah		62.404	50.030
Rata-rata per bulan		5.200	4.169

Sumber: *Bagian Pelayanan Perpustakaan UNRI, 2020*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan ke Perpustakaan UNRI setiap bulannya fluktuatif. Jumlah mahasiswa UNRI pada tahun 2018 sebanyak 35.310 mahasiswa.¹ Jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan ke Perpustakaan UNRI tahun 2018 yang berjumlah 62.404 orang, jumlah pengunjung tiap bulannya masih sangat kecil yaitu hanya

5200 orang. Hal serupa terjadi pada tahun 2019, bahkan mengalami penurunan. Jumlah mahasiswa UNRI pada tahun 2019 sebanyak 35.012 mahasiswa.² Sedangkan jumlah pengunjung ke Perpustakaan UNRI menurun menjadi 50.030 orang dengan rata-rata kunjungan per bulan sebanyak 4.169. Jumlah ini sangat tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa keseluruhan, padahal banyaknya pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan merupakan tolok ukur keberhasilan suatu perpustakaan dan merupakan tujuan dari implementasi Perka Perpusnas No. 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi di Universitas Riau Tahun 2018-2019”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan dalam rumusan masalah ialah:

1. Bagaimana implementasi Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi di Universitas Riau tahun 2018-2019?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi di Universitas Riau tahun 2018-2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

- a. Untuk mendeskripsikan implementasi Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi di Universitas Riau tahun 2018-2019.

¹ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Riau Tahun 2018, hal:4

² Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Riau Tahun 2019, hal:4

- b. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi di Universitas Riau tahun 2018-2019

D. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

a. Kebijakan Publik

W.I. Jenkins merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.³

Adapun tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah:⁴

1) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat terpilih menempatkan masalah pada agenda publik dan berkompetisi untuk masuk dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau

pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang.

5) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah

³ Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara. 2016), hal: 15

⁴ Budi Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Media Pressindo. 2002), hal: 29-30

mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

b. Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn merumuskan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁵

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:⁶

1) Komunikasi

Persyaratan pertama bagi implementasi yang efektif adalah bahwa pelaksana keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga harus jelas. Terdapat tiga faktor yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan faktor komunikasi, yaitu: transmisi (penyaluran komunikasi), kejelasan dan konsistensi.

2) Sumber daya

Meskipun isi kebijakan diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak efektif. Sumber-sumber tersebut meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan publik.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, bila perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Untuk menghindari permasalahan yang timbul akibat perbedaan sikap pelaksana kebijakan dengan pembuat kebijakan maka dapat dilakukan antisipasi dengan memperhatikan aspek pengangkatan birokrat dan pemberian insentif.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980;125). Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Menurut Edward, ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

c. Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 Ayat (4) menyatakan bahwa Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan

⁵ *Ibid.*, hal:101-102

⁶ Budi Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo. 2002), hal: 125-154

pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi termuat dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2017 yang meliputi:

- 1) Standar koleksi perpustakaan;
- 2) Standar sarana prasarana perpustakaan;
- 3) Standar pelayanan perpustakaan;
- 4) Standar tenaga perpustakaan;
- 5) Standar penyelenggaraan perpustakaan;
- 6) Standar pengelolaan perpustakaan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data. Data yang penulis peroleh dikelompokkan menurut jenis dan kegunaannya masing-masing, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif menurut teori dan kerangka pemikiran lalu disajikan dalam bentuk uraian pembahasan mengenai Implementasi Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi di Universitas Riau.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi di Perpustakaan Universitas Riau

1. Standar Koleksi Perpustakaan

Pertama, jenis koleksi Perpustakaan UNRI telah sesuai dengan SNP PT. Jumlah buku wajib telah memenuhi standar, namun perpustakaan UNRI belum menghitungnya berdasarkan ketentuan 3 judul per matakuliah. Jumlah buku pengayaan masih belum

memenuhi standar 2 (dua) kali jumlah buku wajib.

Kedua, koleksi e-resources disesuaikan dengan kebutuhan perguruan tinggi. Perpustakaan UNRI telah memenuhi indikator standar ini. koleksi sumber elektronik (*e-resources*) Perpustakaan UNRI terdiri atas *e-book*, *e-journal*, english corner dan media online yang dapat diakses di website Perpustakaan UNRI (lib.unri.ac.id).

Ketiga, standar jurnal ilmiah minimal 2 judul per program studi. Jumlah jurnal ilmiah langganan tahun 2018 telah memenuhi standar yaitu 226 dan tahun 2019 berjumlah 83 judul. Selain itu Perpustakaan UNRI juga berlangganan *e-journal* yang jumlahnya lebih dari 13.000 judul yang berasal dari 6 provider, yaitu Springer, EBSCO, CENGAGE Learning, Westlaw, CLINICAL KEY dan Emerald.

Keempat, standar koleksi majalah ilmiah ditetapkan minimal 1 (satu) judul berlangganan per program studi. Namun, indikator ini belum tercapai. Jumlah majalah ilmiah yang ada di Perpustakaan UNRI tahun 2018 hanya 83 judul dan tahun 2019 hanya 72 judul. Perpustakaan UNRI juga menyediakan koleksi muatan lokal, yang berupa skripsi, tesis dan disertasi yang dapat diakses secara online, juga tersedia laporan penelitian dan prosiding.

Kelima, penambahan koleksi perpustakaan per tahun ditetapkan minimal 3% dari total koleksi judul yang ada. Namun indikator ini belum terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Penambahan Koleksi
Perpustakaan UNRI Tahun 2018-
2019

Jumlah Koleksi (Judul)		Penambahan koleksi		Penambahan koleksi sesuai SNP (3%)	
2018	2019	2018	2019	2018	2019
27.952	28.377	196	425	838	851

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2020

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2018, jumlah penambahan koleksi hanya 0,07% dari total koleksi yang ada yaitu 196 judul. Pada tahun 2019, total penambahan koleksi mengalami peningkatan, tetapi masih belum memenuhi SNP. Penambahan koleksi tahun 2019 hanya 1,5 % dari total koleksi judul yang ada, yaitu sebanyak 425 judul.

Pengolahan bahan perpustakaan di Perpustakaan Universitas Riau terbagi menjadi 4 bagian yaitu pengolahan koleksi buku, pengolahan koleksi populer, pengolahan koleksi jurnal dan pengolahan koleksi digital. Pengolahan koleksi menggunakan DDC tercetak dan elektronik serta tajuk subyek yang berasal dari perpustakaan nasional. Adapun jumlah pengolahan bahan pustaka yang dilakukan Perpustakaan UNRI pada tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pengolahan Bahan Pustaka
Tahun 2018-2019

No	Jenis Koleksi	2018		2019	
		Judul	Eksemplar	Judul	Eksemplar
1	Buku Teks	512	1547	543	1.039
2	Koleksi digital	7157	1757	6463	6463

Sumber: Data Bidang Pengembangan Koleksi Perpustakaan UNRI

Indikator cacah ulang dalam SNP PT, mengamanatkan perpustakaan untuk melakukan cacah sekali dalam 3 (tiga) tahun. Pada praktiknya, Perpustakaan Unri selalu melakukan cacah ulang setiap tahun walaupun dilakukan per satu kelas buku. Kegiatan penyiangan dan pelestarian koleksi dilakukan bersamaan dengan cacah ulang, sehingga indikator standar untuk penyiangan dan pelestarian koleksi juga telah terpenuhi. Adapun jumlah perbaikan buku pada tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Perbaikan Buku Tahun 2018-2019

Jenis Koleksi	2018	2019
	Eksemplar	Eksemplar
Buku Teks	1490	118

Sumber: Data Bidang Pengembangan Koleksi Perpustakaan UNRI

2. Standar Sarana Prasarana

Indikator pertama standar sarana prasarana yaitu luas gedung. Luas gedung perpustakaan minimal $0,5 \text{ m}^2$ x jumlah seluruh mahasiswa. Sehingga luas minimal Perpustakaan UNRI seharusnya ialah:

$$0,5 \text{ m}^2 \times 35.310 = 17.655 \text{ m}^2$$

Namun, luas perpustakaan sekarang sangat jauh dari standar yang sekarang luasnya hanya 2.450 m^2 . Walaupun luas gedung belum memenuhi standar, namun komposisi ruang Perpustakaan UNRI sudah sesuai standar. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.4
Komposisi Ruang Perpustakaan UNRI

Komposisi ruang	Luas area Perpustakaan UNRI	%
Area koleksi	1.102 m^2	45%
Area pemustaka	612 m^2	25%
Area kerja	491 m^2	20%
Toilet, lobi, ruang rapat, ruang shalat	245 m^2	10%
Jumlah	2.450 m^2	100%

Sumber: TU Perpustakaan UNRI, 2020

Terkait kondisi ruangan, Perpustakaan UNRI menggunakan pencahayaan lampu neon dan lampu pijar, namun jumlahnya belum diatur

berdasarkan SNP Perguruan Tinggi. Pengaturan kelembapan dan temperatur sudah disesuaikan dengan standar yang ada, yaitu 20°C-26 °C untuk temperatur dan 50-57 rh untuk kelembapannya. Perpustakaan UNRI juga telah memenuhi standar minimal sarana yang harus dimiliki perpustakaan perguruan tinggi.

3. Standar Pelayanan Perpustakaan

Pertama, dalam ketentuan SNP PT, jam buka pelayanan minimal 54 jam. Hal ini belum dapat dipenuhi oleh Perpustakaan UNRI sebagaimana yang termuat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Jam Buka Layanan Perpustakaan UNRI

Hari	Jam Layanan	Jam istirahat	Total jam layanan
Senin - Kamis	08.00 – 16.30 WIB	1 jam/hari	30 jam
Jumat	09.00 – 17.00 WIB	12.00 – 13.00	7 jam
Sabtu - minggu	09.00 – 16.00 WIB	WIB	12 jam
Jumlah			49 jam

Sumber: <http://lib.unri.ac.id/>

Waktu pelayanan Perpustakaan UNRI hanya 49 jam. Untuk memenuhi standar tersebut, Perpustakaan UNRI perlu menambahkan sedikitnya 5 (lima) jam pelayanan kepada pemustaka.

Kedua, SNP PT menetapkan minimal pelayanan yang ada di perpustakaan perguruan tinggi yaitu pelayanan sirkulasi, pelayanan referensi dan pelayanan literasi informasi. Perpustakaan UNRI menyediakan 13 layanan fisik dan 10 layanan *online* untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Ketiga, laporan kinerja disampaikan minimal 6 (enam) bulan sekali yang meliputi laporan statistik pengunjung, laporan statistik peminjaman dan pengembalian, serta laporan statistik keterpakaian koleksi. Perpustakaan UNRI menyampaikan laporan kinerjanya setiap bulan. Setiap awal tahun Perpustakaan UNRI juga menyampaikan laporan terkait seluruh

transaksi yang dilakukan Perpustakaan UNRI kepada Wakil Rektor IV melalui bagian Sistem Informasi. Perpustakaan UNRI juga membuat LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) setiap tahun.

Indikator keempat yaitu kerja sama perpustakaan. Indikator ini telah dipenuhi oleh Perpustakaan UNRI. Pada tahun 2018 Perpustakaan UNRI menjalin 3 (tiga) kerja sama yaitu dengan Perpustakaan Universitas Bengkulu, Perpustakaan STMIK Amik Riau dan dengan Perpustakaan Akbid Sempena Negeri. Pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) kerja sama yang dijalin dengan perguruan tinggi lain yaitu dengan UPT Perpustakaan Universitas Jambi dan dengan Perpustakaan Universitas Pertahanan (Unhan). Kerja sama yang dilakukan tersebut terkait pengembangan SDM, pengembangan koleksi dan pelayanan, dan pemanfaatan fasilitas bersama. Perpustakaan UNRI juga menjalin kerja sama dengan berbagai instansi untuk memperluas sumber informasi, antara lain dengan LIPI, Perpustakaan Nasional, batan, Bank Indonesia, BSNI, BPPT, dan World Bank.

Indikator kelima yaitu promosi. Perpustakaan UNRI telah melakukan promosi untuk memperkenalkan pelayanan dan jasa perpustakaan baik itu promosi internal maupun eksternal. Promosi internal dilakukan perpustakaan dengan membagikan buku panduan dan sosialisasi ke mahasiswa baru. Adapun promosi eksternal yang dilakukan Perpustakaan UNRI ialah promosi melalui media sosial seperti instagram (@unri_library) dan facebook Perpustakaan UNRI, mengembangkan website, serta berkunjung ataupun menerima kunjungan ke Perpustakaan UNRI. Namun promosi yang dilakukan Perpustakaan UNRI masih minim. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jumlah

kunjungan mahasiswa ke Perpustakaan UNRI masih sedikit dan beberapa mahasiswa bahkan tidak mengetahui pelayanan apa saja yang diberikan oleh Perpustakaan UNRI baik *online* maupun *offline*. Promosi eksternal yang dilakukan Perpustakaan UNRI juga sangat minim. Hal ini dapat dilihat dari tabel jumlah pengunjung umum yang datang ke Perpustakaan UNRI di bawah ini.

Tabel 2.6
Jumlah Pengunjung umum

No	Tahun	Jumlah Pengunjung Umum
1	2018	580
2	2019	158

Sumber: Data Bidang Pelayanan Perpustakaan UNRI

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat luar civitas akademik Universitas Riau yang memanfaatkan Perpustakaan UNRI masih sangat sedikit sekali.

4. Standar Tenaga Perpustakaan

Pertama, kualifikasi kepala perpustakaan minimal pendidikan magister yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Kepala Perpustakaan UNRI saat ini yaitu H. Edyanus Herman Halim, SE, MS berpendidikan Magister Sains dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan perpustakaan serta belum memiliki sertifikat kompetensi perpustakaan.

Kedua, rasio pustakawan sesuai standar yang ditetapkan yaitu, setiap 500 mahasiswa paling sedikit 1 (satu) pustakawan. Jika terdapat 35.310 mahasiswa pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 jumlah total mahasiswa sebanyak 35.012 orang, maka jumlah pustakawan yang seharusnya ada sebanyak 70 orang pustakawan. Namun, total pustakawan yang ada di tahun 2018 hanya 19 orang. pada tahun 2019

jumlah pustakawan mengalami penambahan 4 (empat) orang, sehingga jumlahnya menjadi 23 orang. namun, jumlah pustakawan tersebut masih jauh dari standar.

Ketiga, Rasio tenaga teknis yaitu setiap 5.000 (lima ribu) mahasiswa paling sedikit 1 (satu) tenaga teknis perpustakaan. Jika terdapat 35.310 mahasiswa pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 jumlah total mahasiswa sebanyak 35.012 orang, maka jumlah tenaga teknis yang dibutuhkan sebanyak 7 orang. Jumlah tenaga teknis yang ada saat ini sebanyak 18 dengan latar pendidikan sarjana sebanyak 12 orang, latar belakang pendidikan SLTA 4 orang, selebihnya D3 sebanyak 1 orang, dan SLTP 1 orang. Jumlah ini dua kali lipat jumlah minimum tenaga teknis.

5. Standar Penyelenggaraan

Perpustakaan UNRI didirikan tahun 1962 berdasarkan SK Rektor Universitas Riau. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 009/01/2003, tentang Statuta Universitas Riau, maka UPT Perpustakaan Riau merupakan bagian dari unit pelaksana teknis dalam struktur organisasi Universitas Riau. Perpustakaan UNRI sudah memiliki Nomor Pokok Perpustakaan yaitu 1471082D1010432. Struktur organisasi Perpustakaan UNRI juga sudah sesuai dengan SNP PT dan Perpustakaan UNRI telah mengatur program kerja perpustakaan dengan cukup baik, program kerja dibagi berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan oleh kepala perpustakaan melalui hasil rapat secara internal.

6. Standar Pengelolaan Perpustakaan.

Dalam renstra tersebut termuat visi, misi dan tujuan Perpustakaan UNRI

yang telah diselaraskan dengan visi dan misi Universitas Riau. Mengenai kebijakan, Perpustakaan UNRI juga telah bersinergi dengan kebijakan Universitas Riau yaitu mengedepankan Tridarma Perguruan Tinggi, seperti survey kebutuhan buku wajib untuk menyediakan koleksi perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka demi mendukung fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Fungsi Perpustakaan UNRI juga sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu fungsi edukatif, fungsi riset, fungsi informatif, fungsi deposit dan fungsi rekreatif.

Dalam Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi alokasi anggaran perpustakaan setiap tahun paling sedikit 5% (lima persen) dari total anggaran perguruan tinggi di luar pengembangan fisik dan gaji. Namun, anggaran yang dialokasikan untuk Perpustakaan UNRI bahkan tidak mencapai 1 dari total anggaran universitas dan anggaran yang diberikan tersebut masih termasuk pengembangan fisik dan gaji. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.7
Jumlah Anggaran Perpustakaan
UNRI Tahun 2018-2019

Thn	Anggaran Universitas	Anggaran Perpus UNRI	(%)
2018	Rp540.073.436.000	Rp4.690.000.000	0,87
2019	Rp541.652.094.000	Rp4.795.420.000	0,89

Sumber: LAKIP Universitas Riau Tahun 2018 dan 2019

Terkait penerapan teknologi informasi dan komunikasi, Perpustakaan UNRI telah menggunakan sistem otomasi sejak tahun 2011 dengan menggunakan *Senayan Library Information Management System (SliMS)*. Perpustakaan UNRI di bawah

bidang IT telah mengembangkan sistem ini dengan komplemen-komplemen lainnya sesuai dengan kebutuhan seperti peminjaman dan pengembalian mandiri yang diterapkan sejak 30 Agustus 2013, *SMS gateway*, *statistic realtime*, absen pengunjung, serta masih banyak lagi

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi di Universitas Riau Tahun 2018-2019

1. Komunikasi

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan faktor komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

a. Transmisi

Penyampaian informasi atau transmisi kebijakan tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi yang termuat dalam Perka Perpusnas No.13 Tahun 2017 telah tersampaikan dengan baik. Selain diwajibkan untuk menyelenggarakan perpustakaan sesuai dengan Perka Perpusnas No.13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan UNRI juga dituntut untuk mendukung kinerja rektor UNRI. Salah satunya ialah menjadi perpustakaan yang baik. Perpustakaan yang baik ialah perpustakaan yang terakreditasi A dan terstandarisasi (sesuai dengan sistem manajemen mutu ISO). Semua unsur yg terkait dalam organisasi Perpustakaan UNRI diarahkan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.

b. Kejelasan

Indikator standar yang ada dalam Perka Perpusnas No.13 Tahun 2017 tentang Standar

Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi sangat jelas tersampaikan dan dipahami oleh setiap unsur Perpustakaan UNRI. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya sebagian besar indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam standar tersebut yang membuktikan bahwa seluruh staff Perpustakaan UNRI bekerja atau melakukan kegiatan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.

c. Konsistensi

Perpustakaan UNRI telah mendapatkan akreditasi A sejak tahun 2013 dan kembali mendapatkan akreditasi A pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Perpustakaan UNRI konsisten dalam menyelenggarakan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi. Selain itu Perpustakaan UNRI juga terus berupaya untuk meningkatkan pelayanannya, seperti penambahan 4 orang pustakawan di tahun 2019, pengembangan e-library, peningkatan server untuk mendukung kinerja SLiMS.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang penting itu meliputi staff, informasi, wewenang dan fasilitas.

a. Staff

Perpustakaan UNRI masih membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam hal ini pustakawan. Menurut Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan UNRI membutuhkan 70 orang pustakawan, namun yang ada saat ini hanya 23 orang. Hal ini menyebabkan kurang efektif dan efisiennya kinerja pustakawan. Staf bagian IT saat ini hanya ada 3 orang sehingga staf akan kewalahan

ketika terjadi masalah. Hal ini juga mengakibatkan tidak terbarukannya media promosi online Perpustakaan UNRI yaitu website dan akun sosial media.

b. Informasi

Sumber daya informasi untuk melaksanakan Perka Perpustakaan No. 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi sudah terpenuhi. Dalam Perka Perpustakaan No.13 Tahun 2017 tersebut sudah tertera jelas indikator apa saja yang harus dipenuhi agar sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.

c. Wewenang

Setiap Unsur/staf yang ada di Perpustakaan UNRI diangkat dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Riau. Seluruh staf Perpustakaan Universitas Riau memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan Perpustakaan UNRI yang termuat dalam Peraturan Rektor Universitas Riau No. 1 Tahun 2015 tentang Perpustakaan Terpadu Universitas Riau dan Peraturan Rektor Universitas Riau No. 2 Tahun 2015 tentang Serah-Simpan Karya Ilmiah Di Lingkungan Universitas Riau. Peraturan Rektor Universitas Riau tersebut merupakan pedoman Perpustakaan Universitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap pelaksana kebijakan Perpustakaan UNRI.

d. Fasilitas

Total anggaran yang didapatkan Perpustakaan UNRI untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan sangat sedikit bahkan tidak

mencapai 1% dari total anggaran universitas. Anggaran yang masih jauh dari standar ini berpengaruh terhadap fasilitas yang tersedia untuk menunjang fungsi dari perpustakaan itu sendiri, seperti luas gedung perpustakaan yang belum dapat menampung jumlah seluruh mahasiswa UNRI dan jumlah koleksi yang masih kurang. Kurangnya jumlah komputer yang belum mencukupi dan spesifikasi yang belum sesuai dengan kebutuhan, seperti hanya ada 2 pc dari 20 pc yang ada di ruangan koleksi spesial yang aktif mengakibatkan terhambatnya pelayanan skripsi, tesis dan disertasi *online* kepada pemustaka. Kurangnya server yang memadai mengakibatkan rentannya server terhadap kerusakan yang disebabkan oleh suplai listrik yang tidak stabil dan hujan petir, sehingga sering mengakibatkan kerusakan sistem. Selain itu infrastruktur seperti router yang dapat menghalangi peretasan sistem juga masih kurang. Sistem Perpustakaan UNRI sering kali diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan lumpuhnya sistem otomatisasi perpustakaan.

3. Disposisi

Dua hal penting berkenaan dengan disposisi yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif.

a. Pengangkatan Birokrasi

Kepala Perpustakaan beserta staf telah diangkat melalui SK Rektor Universitas Riau. Pengangkatan Kepala Perpustakaan yaitu Bapak Edyanus Herman Halim, SE, MS tertuang dalam SK Rektor nomor 113/UN19/KP/2019 tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan

Universitas Riau Pengganti Antar Waktu Periode 2015-2019.⁷ Seluruh Staf Perpustakaan UNRI diberi kesempatan dan sarana untuk mengembangkan diri melalui pelatihan-pelatihan kepastakaan, mengikuti pelatihan tentang kualitas pelayanan, mengikuti diklat, workshop, studi banding dan kunjungan serta diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Sehingga setiap staf memiliki kesempatan untuk naik jabatan, misalnya dari pustakawan penyelia menjadi pustakawan muda atau dari tenaga teknis menjadi pustakawan. Hal ini merupakan salah satu cara Perpustakaan UNRI untuk menambah jumlah pustakawan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya.

b. Insentif

Setiap pegawai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Riau termasuk kepala dan staf Perpustakaan Universitas Riau mendapatkan insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara berupa Rupiah Murni maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU (Badan Layanan Umum) Universitas Riau. Kepala dan staf Perpustakaan UNRI akan mendapatkan insentif jika telah memenuhi tugas standar dan terevaluasi mencapai realisasi target kinerjanya sesuai jabatan masing-masing.

4. Struktur Birokrasi

a. Standar Operational Procedure (SOP)

Dalam Perka Perpustnas No. 13 Tahun 2017 tentang Standar

⁷ <https://lib.unri.ac.id/2019/2/> diakses pada Juli 2020

Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi, tertera jelas struktur organisasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia. Untuk Perpustakaan UNRI struktur organisasi dan SOP tersebut diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Riau No. 1 Tahun 2015 tentang Perpustakaan Terpadu Universitas Riau. Dari sinilah dapat dilihat bahwa penyelenggaraan Perpustakaan UNRI sesuai dengan Perka Perpustnas No. 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi secara prosedural dapat terlaksana karena didukung SOP yang jelas dan terstruktur. Setiap bagian memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas.

b. *Fragmentasi*

Edward III menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.⁸ Secara fragmentasi, implementasi Standar Nasional Perpustakaan di Perpustakaan UNRI sudah berjalan dengan baik karena koordinasi yang dilakukan hanya antara Rektorat, Perpustakaan Pusat Universitas Riau, dan Perpustakaan Cabang yang ada di fakultaas. Koordinasi antara ketiga unsur tersebut dapat dilakukan dengan mudah berkat adanya sistem yang memuat laporan kegiatan yang dilakukan Perpustakaan UNRI setiap bulannya, sehingga pimpinan dapat mengetahui secara langsung

capaian kinerja dari Perpustakaan UNRI.

Koordinasi antara Peprustakaan Pusat dengan Perpustakaan Cabang hanya terkait staff (pustakawan) yang menjadi kepala cabang perpustakaan fakultas dan terkait koleksi. Namun, hal yang terkait tentang kebijakan, jumlah anggaran, penambahan jumlah buku, sarana prasarana, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan ditentukan oleh kebijakan masing-masing fakultas. Sehingga pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh setiap perpustakaan fakultas tidak merata. Hal ini juga mengakibatkan Perpustakaan Fakultas tidak berkembang mengikuti perkembangan perpustakaan induknya.

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Implementasi Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi di Universitas Riau tahun 2018-2019 belum optimal. Hal ini ditandai dengan standar koleksi di Perpustakaan UNRI belum terpenuhi sepenuhnya, seperti jumlah koleksi buku pengayaan, jumlah majalah ilmiah dan jumlah penambahan koleksi pertahun. Standar gedung yang belum sesuai standar, waktu pelayanan yang masih kurang, standar tenaga yang tidak memenuhi kualifikasi, serta anggaran yang didapat untuk pengembangan Perpustakaan UNRI belum memenuhi standar.
2. Faktor komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi sesuai teori Edward III sudah tercapai. Namun faktor sumber daya masih belum tercapai. Hal inilah yang menjadi penyebab kurangnya minat

⁸ Budi Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo. 2002), hal: 150

mahasiswa untuk mengunjungi Perpustakaan UNRI.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti terkait penelitian yang telah dilakukan ialah:

1. Pimpinan Universitas Riau dan Perpustakaan UNRI harus terus berkoordinasi dan berupaya untuk menyusun rencana keuangan anggaran yang inovatif berdasarkan kebutuhan pengembangan serta terus mencari alternatif lain untuk memenuhi kekurangan sumber daya yang dimilikinya.
2. Koordinasi antara Perpustakaan Pusat Universitas Riau dengan Perpustakaan Cabang harus lebih ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah status Perpustakaan UNRI dari Unit Pelaksana Teknis menjadi Subsistem dari sistem pendidikan, supaya koordinasi antara Perpustakaan Pusat dengan Perpustakaan Cabang dapat berjalan sepenuhnya. Sehingga setiap Perpustakaan Cabang dapat mengikuti perkembangan Perpustakaan Pusat sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
3. Perpustakaan UNRI harus lebih agresif dalam melakukan promosi baik itu internal maupun eksternal, sehingga Perpustakaan UNRI akan lebih dikenal dan pengguna layanan perpustakaanpun semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Agutino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

- Darwanto, dkk. 2015. *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI
- MM, Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII
- Narbuko, Cholid & Ahmadi, H Abu. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- NS, Sutarno. 2008. *Kamus Perpustakaan dan Informasi*. Jakarta: Jala Permata
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sedarmayang & Hidayat, Syarifudin. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju
- Strauss, Anselm & Corbin Juliet. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Skripsi/Jurnal

- Bamayi, Stephanie. 2017. *Implementasi Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi (SNP 010:2011) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi (UMMI)*
- Elvina. 2016. *Opini Pemustaka tentang Layanan Perpustakaan Universitas Riau dalam Menunjang Proses Perkuliahan Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Keguruan*

- dan Ilmu Pendidikan). JOM FISIP Vol. 3, No.2
- Ganggi, Roro Isyawati Permata. 2015. *Dualisme Standar Perpustakaan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Implementasi Standar Perpustakaan Perguruan Tinggi di Perpustakaan Universitas di Yogyakarta)*
- Handari, Budi. 2016. *Kontribusi Perpustakaan Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi*. Libraria Vol 4. No. 1
- Khairiah, Badra. 2019. *Analisis Kualitas Layanan Perpustakaan Universitas Riau Terhadap Kepuasan Pemustaka Menggunakan Metode Libqual*
- Syamsudin, Anwar. 2000. *Manajemen dan Peran Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Sistem Kredit Semester (SKS) & Sumber Belajar*. Al-Maktabah, Vol 2. No.2
- Winanda, Novri. 2017. *Evaluasi Implementasi Standar Nasional Perpustakaan (SNP 002: 2011) pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara*
- Yuliani, Dini. 2015. *Analisis Kebijakan Standarisasi Perpustakaan Perguruan Tinggi (Kajian terhadap Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*. MODERAT Vol. 1, No.4

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU

- No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Rektor Universitas Riau No. 1 Tahun 2015 tentang Perpustakaan Terpadu Universitas Riau

Sumber-sumber Lain

- Bambang Supriyo Utomo. *Standar Bidang Perpustakaan Terkait Digitalisasi Perpustakaan Perguruan Tinggi*. Disampaikan dalam Seminar Standar Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia. Bandung: 2009
- <https://lib.unri.ac.id/>
- Dokumen Evaluasi Kinerja Berbasis ISO 9001:2008 Perpustakaan Universitas Riau Tahun 2017
- Dokumen Rencana Strategis UPT. Perpustakaan Universitas Riau 2015-2019
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Riau Tahun 2018
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Riau Tahun 2019